

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rusdi., Pilcher, Robyn dan Perrin, Brian. 2012. Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government. *Pacific Accounting Review* (Vol. 24 No. 3; 262-291).
- Akbar, Rusdi., Pilcher, Robyn dan Perrin, Brian. 2015. Implementing Performance Measurement Systems: Indonesian Local Government Under Pressure. *Qualitative Research in Accounting & Management* Vol.12 No.1 2015 pp 3-33.
- Ahyaruddin, Muhammad dan Akbar, Rusdi. 2016. Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif Teori Institusional. *Celsitech UMRI 2016 - volume 1 Sep-2016*.
- Arnaboldi, Michela dan Azzone, Givovanni. 2010. Constructing Performance Measurement in The Public Sector. *Critical Perspectives on Accounting* 21, pp. 266-282.
- Bastian, I., 2001. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Bastian, I., 2014. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.
- Bourne, M., Kennerley, M. and Franco-Santos, M. 2005. Managing Through Measures: a Study of Impact on Performance, *Journal of Manufacturing Technology Management*, Vol. 16, No. 4, pp. 373-395.
- BPKP. 2011. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Bogor. Pusdiklatwas BPKP.
- Cavalluzzo, K. S., dan C. D. Ittner. 2004. Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence From Government. *Accounting, Organizations and Society* 29 (3-4): 243-267. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(03\)00013-8](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00013-8).
- Cooper, Donald R dan Schindler, Pamela. 2006. Metode Riset Bisnis Volume 1. Jakarta. Media Global Edukasi.
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. SAGE Publications, Inc.
- DiMaggio, P.J., Powell, W.W., 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality In Organizational Fields. *Am. Sociol. Assoc.* Vol. 48 No. 2.
- Fahmi, Irfan. 2010. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Gomes, P., Mendes, S. dan Carvalho, J. 2008. Use of performance measurement in the public sector: the case of the police service. *Implementing Reforms in Public Sector Accounting*, 407-426.
- Gray, R., Owen, D., Adams, C., 1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall Europe, London.
- Gudono, 2012. *Teori Organisasi*, Kedua. ed. BPFE Yogyakarta.
- Halim, A., 2004. Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah.
- Hatry, Harry P., 2006. *Performance Measurement: Getting Results*. Urban Institute.

- Diakses pada 8 Januari 2022 melalui www.researchgate.net.
- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., 2012. *Qualitative Research Methods*. London. SAGE Publications, Ltd.
- Hood, Christopher. 1995. The New Public Management in The 1980's: Variation on A Theme. *Accounting, Organisation and Society* Vol. 20, No 2/3, pp 93-109. 1995
- IFC dan OJK. 2014. *The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition*. Diakses pada 8 Januari 2022 melalui www.ojk.go.id.
- Iyoha, F. O. dan D. Oyerinde. 2010. Accounting infrastructure and accountability in the management of public expenditure in developing countries: a focus on Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting* 21(5): 361 – 373. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.06.002>.
- Kementerian Agama. 2019. Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2019
- _____. 2020. Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020.
- Kementerian PAN-RB. 2007. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- _____. 2010. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. 2015. Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015.
- _____. 2020. Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020.
- _____. 2015. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implemantasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. 2018. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.
- _____. 2018. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- _____. 2018. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.
- _____. 2017. Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.
- _____. 2018. Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.
- _____. 2019. Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.

- _____. 2020. Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- _____. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
- _____. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- LAN, BPKP, 2000. Akuntabilitas dan Good Governance.
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset, Yogyakarta.
- Matthews, Joseph R. 2011. Assessing Organizational Effectiveness: The Role of Performance Measures. *Library Quarterly*, Vol. 81, No. 1, The University of Chicago.
- Poister, Theodore H. 2003. *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations*. San Francisco, CA: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- _____. 1999. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. 2019. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.
- _____. 2019. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- _____. 2020. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024.
- Sofyani, Hafiez dan Akbar, Rusdi. 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI)*, Vol.10, No.2, p.184-205.
- _____. 2015. Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah Dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 19 (2): 153–173. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art6>.
- Sofyani, Hafiez, Akbar, Rusdi dan Ferrer, Rodiel C. 2018. 20 Years of Performance Measurement System (PMS) Implementation in Indonesian Local Governments: Why is Their Performance Still Poor?. *Asian Journal of Business and Accounting* 11(1).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

- Syachbrani, W., dan Akbar, Rusdi. 2013. Faktor-Faktor Teknis dan Keorganisasian yang Memengaruhi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, ISSN: 2088-0685, Vol. 3, No. 2, Oktober 2013, hlm. 447—464.
- Teodoro, Manuel P. 2014. When Professionals Lead: Executive Management, Normative Isomorphism, and Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol 24, No.4, pp 983-1004, Oktober 2014.
- Wargadinata, Ella. 2017. Kualitas Pengukuran Kinerja Organisasi Publik. *Sosiohumaniora*, Volume 19 No. 2 Juli 2017: 86-94.
- Yusrianti, Hasni dan Safitri, Rika Hendra. 2015. Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada SKPD Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol.13 No. 4